

BAB III ISU – ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah serta melaksanakan ketatausahaan dinas menunjukkan bahwa keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok sangat strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok yang baik sesuai kaidah good governance .

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset juga bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu :

1. Pembayaran pajak daerah meliputi pembayaran PBB, BPHTB dan dan pembayaran pajak daerah lainnya;
2. Pembayaran Retribusi Daerah;
3. Pembayaran Santunan Kematian;
4. Pembayaran Bantuan Keuangan / Hibah dan belanja tidak terduga

Selain pelayanan langsung kepada masyarakat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset juga melayani pengelolaan keuangan dan aset OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kota Depok, meliputi :

1. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA - OPD);
2. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA - OPD);
3. Melayani dan memfasilitasi penatausahaan keuangan (SPD, SPP, SPM dan SP2D);
4. Melayani dan memfasilitasi penyusunan laporan keuangan;
5. Melayani dan memfasilitasi pengelolaan barang daerah.

Di Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, tentu tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan selama kurun waktu lima tahun terakhir antara lain :

1. Adanya *lost potensi pajak daerah* diantaranya :
 - a. Banyak pelaku usaha potensial yang tidak menjadi wajib pajak. Hal ini karena pelaku usaha belum mengurus perizinan atas usahanya sehingga tidak dapat dipungut pajaknya
 - b. Adanya perubahan fungsi bangunan yang semula bangunan rumah tinggal berubah menjadi tempat usaha (misalnya warung makan)
2. Adanya pembatasan jumlah omzet sebagai persyaratan ditetapkannya pribadi atau badan sebagai wajib pajak restoran
3. Kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dengan maksud untuk meningkatkan perolehan omzetnya
4. Adanya pembatasan jumlah kamar untuk rumah kost (di atas 10 kamar) sebagai persyaratan ditetapkannya pribadi atau badan sebagai wajib pajak hotel
5. Nilai Perolehan Air (NPA) yang didapat dari Dinas BMSDA setiap bulan jumlahnya *flat* (tetap) yang berdampak rendahnya realisasi pajak air tanah
6. Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk Kota Depok termasuk paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten / kota sekitarnya yang berdampak rendahnya realisasi pajak reklame
7. Usaha *vallet parking* belum menjadi obyek pajak daerah
8. Belum optimalnya penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini
9. Belum optimalnya peningkatan pelayanan pajak daerah yang lebih baik dan terpadu
10. Terus bertambahnya jumlah angka Piutang PBB Wajib Pajak setiap tahunnya
11. Belum efektifnya koordinasi antar OPD yang terkait dengan pajak daerah
12. Sistem teknologi informasi yang ada di masing masing bidang masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi, sehingga dirasakan kurang handal dan tidak dapat sepenuhnya mendukung penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua
13. Proses pencairan anggaran kegiatan yang menumpuk di Triwulan IV

14. Belum sinkronnya penatausahaan penerimaan pajak antara kas daerah dengan bidang pendapatan
15. Belum optimalnya pembaruan data kepegawaian
16. Belum adanya aplikasi BPJS Kesehatan yang memudahkan sinkronisasi dan updating data antara Pemkot dan BPJS
17. Masih minimnya perhatian OPD terhadap pengelolaan barang milik daerah
18. Pimpinan OPD belum sepenuhnya mengacu kepada kebutuhan riil dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
19. Daftar Kebutuhan Barang Unit belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pengadaan barang
20. Belum adanya data base pemanfaatan aset, sehingga dalam pemanfaatan barang milik daerah baik pinjam pakai, sewa, kerjasama, pemanfaatan, BGS, BSG maupun kerjasama infrastruktur masih mengacu berdasarkan permohonan yang masuk
21. Realisasi penerbitan sertifikat oleh BPN tidak jelas batas waktu penyelesaiannya
22. Belum meratanya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset di semua OPD
23. Kurangnya SDM pengelola pendapatan, penatausahaan keuangan dan aset yang berkualitas
24. Pedoman penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri belum sejalan dengan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Sehingga diperlukan penyelarasan kode rekening penganggaran dengan sistem tersebut.
25. Belum adanya sinkronisasi dan integrasi sistem penganggaran dimulai dari RKPD, penyusunan KUA / PPAS, Penyusunan RAPBD dan Analisa Standar Belanja (ASB) / SSH.

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WA KDH TERPILIH

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, Visi Pemerintah Kota Depok yaitu “ Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius ”.

Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai : terjaminnya hak - hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing – masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan lima (5) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai – nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

Sejalan dengan visi dan misinya, telah diidentifikasi beberapa isu strategis kepala daerah yang akan melandasi program - program unggulan kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya. Isu – isu strategi tersebut yaitu :

1. Infrastruktur
2. Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi
3. Kualitas Lingkungan Hidup
4. Ekonomi Kreatif dan UMKM Berbasis Potensi Lokal
5. Tata Kota
6. Ketahanan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan
7. Ketimpangan
8. Kemiskinan dan Pengangguran

9. Kesehatan
10. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari keseluruhan visi dan misi di atas, pembangunan Depok dalam 5 tahun ke depan akan ditekankan pada tiga program unggulan utama yang menjadi payung besar dari program – program lainnya yaitu :

1. Depok Kota Sehat (Smart Healthy City)
2. Depok Kota Bersih (Zero Waste City)
3. Depok Kota Ramah Keluarga (Family Friendly City)

Disamping itu terdapat 10 janji walikota dan wakil walikota terpilih yang telah disampaikan secara publik. Kesepuluh janji tersebut merepresentasikan keinginan walikota dan wakil walikota untuk mencapai Depok unggul, nyaman dan religius. Adapun kesepuluh janji tersebut adalah :

1. Program Depok Peduli Pendidikan
2. Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di Setiap Kecamatan dan Pembangunan RSUD di Wilayah Timur
3. Pembangunan Taman Terpadu di Setiap Kelurahan
4. Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan Panggung Budaya dan Kreatif
5. Revitalisasi / Pembangunan Pasar Rakyat yang Bersih dan Nyaman dan Penyediaan 1000 Kios / Los UMKM
6. Pengembangan Sentra Industri Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer)
7. Peningkatan Insentif RT, RW dan LPM
8. Peningkatan Dana Operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu
9. Pemberian Dana Insentif bagi Pembimbing Rohani
10. Pembangunan Alun - Alun Kota Depok

Dengan memperhatikan rangkaian visi, misi, program unggulan serta janji kepala daerah di atas, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dapat ditarik relevansinya sebagai berikut :

1. Secara umum, keberhasilan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berkonsekuensi terhadap



kemampuannya dalam menyediakan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai keseluruhan agenda kepemimpinan daerah

2. Secara teknis, peran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan misi kesatu, ketiga dan keempat

Relevansi hubungan antara visi, misi, program unggulan kepala daerah dan program - program operasional dalam RPJMD yang terkait dengan tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta identifikasi tentang faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius

NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	FAKTOR		USULAN KEGIATAN / LANGKAH /UPAYA
			PENGHAMBAT	PENDORONG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	MISI I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional				
1.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Belum adanya Rencana kebutuhan barang unit	Kurang perhatiannya para pejabat terkait	Telah terdapat Perwal tentang standar satuan harga belanja daerah	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum adanya ketentuan kapan suatu langkah pemeliharaan harus dilakukan	Tidak ada standar pemeliharaan sarana dan prasarana	Telah terdapat Perwal tentang standar satuan harga belanja daerah	Penyusunan standar pemeliharaan sarpras
3.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	1. Pengelola kegiatan tidak disiplin dalam melaksanakan kegiatan 2. Penyusunan anggaran kas tidak cermat	Telah tersedia aplikasi SIEP dan SIEVK	1. Menyusun Smart Planning 2. Melaksanakan movev kegiatan secara lebih intensif
		Ukuran capaian kinerja belum dirumuskan secara kuantitatif	Belum dimanfaatkannya LAKIP untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan progam dan kegiatan, dan peningkatan kinerja	Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKA telah disusun sesuai peraturan yang berlaku dan selaras dengan dokumen atasannya (RKPD dan RPJMD)	Menyusun indikator capaian kinerja secara kuantitatif
		Pengalokasian anggaran kegiatan tidak pada nomenklatur program yang telah	Tidak disiplin dalam pelaksanaan proses perencanaan	Semua anggaran kegiatan harus dialokasikan sesuai dengan	Mengintensifkan proses penelitian dokumen perencanaan



		ditetapkan		nomenklatur yang ada	
4.	Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	1. Sistem yang ada di tiap bidang belum terintegrasi 2. Belum ada sistem pengaduan berbasis teknologi informasi di DPPKA	Tidak adanya SDM IT yang ditugaskan di DPPKA	1. Makin dikenalnya konsep good governance bagi instansi pemerintah 2. Sudah ada sistem pengaduan di Diskominfo	1. Perlunya penambahan SDM IT 2. Membangun sistem pengaduan berbasis teknologi informasi
5.	Program Standarisasi Pelayanan Publik	Belum seluruh bidang memiliki SOP untuk pelayanan publik	Kurangnya pemahaman dalam menyusun SOP	Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik semakin tinggi	Penyusunan SOP pelayanan di tiap bidang
6.	Program Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Payung hukum dari pusat terbit di tengah pelaksanaan anggaran sehingga kegiatan penyusunan produk hukum disisipkan ke kegiatan yang lain	Produk hukum yang dibuat harus menunggu payung regulasi dari pusat. Hal ini terkadang menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat	Setiap keputusan / kegiatan membutuhkan kepastian hukum	Penyusunan produk hukum berupa perda / perwal
7.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1. Data dasar yang ada tidak akurat. 2. Data yang sudah ada tidak pernah di update sehingga perencanaan tidak berdasarkan data yang terkini	Kegiatan pendataan yang dilaksanakan hasilnya tidak memuaskan	1. Adanya target 2. Adanya tuntutan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan	1. Pemutahiran data 2. Pengembangan Integrasi data
8.	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Kurang siapnya OPD terkait dalam memahami Standar Akuntansi Berbasis Akrua	1. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan penempatan SDM yang kurang sesuai dengan disiplin ilmu	1. Telah ditetapkannya peraturan walikota terkait kebijakan dan sistem akuntansi berbasis akrua dan telah disesuaikan SIPKD berbasis akrua	1. Pembinaan pengelola keuangan OPD 2. Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota
		2. Belum sinkronnya penatausahaan penerimaan pajak antara kas daerah dengan bidang pendapatan	2. Belum adanya sistem yang memfasilitasi pembayaran pajak melalui mekanisme transfer ke kas daerah	2. Telah adanya sistem aplikasi dasar pajak daerah	Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
		3. Prosedur updating data kepegawaian belum optimal	3. Kurangnya koordinasi antara BKD dan OPD dengan bidang perbendaharaan terkait updating data pegawai	3. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengelola kepegawaian di OPD terkait ketentuan di bidang kepegawaian	Bimbingan teknis untuk pengelola kepegawaian OPD



		4. Belum optimalnya proses penyusunan APBD	4. Belum optimalnya kualitas penyusunan dan penelitian RKA	4. Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi	1. Integrasi system RKPD on line dengan SIPKD 2. Penyusunan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS 3. Penelitian RKA dan Perubahan RKA 4. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD 5. Penelitian DPA dan Perubahan DPA 6. Pembinaan berkala terhadap aparatur perencana di OPD
		5. Besaran penerimaan pendapatan daerah selain PAD bergantung kepada kewenangan dan formulasi pemerintah dan provinsi	5. Sering terjadi keterlambatan penyampaian informasi atau data sehingga menyulitkan dalam menyusun estimasi target penerimaan yang bersumber dari pendapatan non PAD	5. SK kemenkeu, SK Kemendagri dan SK Gubernur tentang alokasi dana pusat dan propinsi	Koordinasi dengan pemerintah dan provinsi secara intensif
9.	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur DPPKA	Menyusun rencana kebutuhan pelatihan , diklat teknis aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
10.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah	1. Kurangnya kepedulian dan tanggungjawab pejabat terkait di masing masing OPD terhadap fungsi pengelolaan aset 2. Kurang tertibnya penatausahaan aset di masing – masing OPD 3. Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pengadaan barang 4. Tidak adanya kepastian waktu dalam penyelesaian sertifikat aset milik Pemkot karena dokumen alas hak atas aset pemerintah Kota Depok tidak lengkap sehingga	1. Adanya Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan barang daerah 2. Audit aset dari aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah	1. Sosialisasi pengelolaan barang daerah 2. Penertiban penggunaan barang daerah 3. Sinkronisasi aset tetap antara OPD dengan DPPKA



			menyulitkan dalam pengamanan aset dari aspek administrasinya		
	MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan				
11.	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Belum optimalnya pemungutan pajak daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 3. Kurang optimalnya provider sistem dalam memberikan pelayanan jaringan internet 4. Masih terbatasnya akses pembayaran secara elektronik 5. Belum adanya SDM penegak hukum bidang perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pajak daerah sudah berbasis teknologi informasi 2. Memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar 3. Letak geografis Kota Depok yang strategis berbatasan dengan ibukota negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 2. Sosialisasi pajak daerah 3. Penagihan pajak daerah 4. Pemberian Penghargaan kepada wajib pajak daerah 5. Diklat / bintek aparatur pengelola pajak dan penegak hukum bidang pajak daerah 6. Pengembangan kerjasama dengan pihak perbankan 7. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan pajak daerah
	MISI IV : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah				
12.	Program Pengamanan dan Penertiban Aset RTH				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan barang daerah



3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA OPD PROVINSI

Dokumen Renstra Kementerian / Lembaga yang memiliki kaitan erat dengan Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian Keuangan . Telaahan atas keterkaitan tersebut digambarkan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KEMENTERIAN KEUANGAN			
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal	Belum optimalnya pemungutan pajak daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 3. Kurang optimalnya provider sistem dalam memberikan pelayanan jaringan internet 4. Masih terbatasnya akses pembayaran secara elektronik 5. Belum adanya SDM penegak hukum bidang perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pajak daerah sudah berbasis teknologi informasi 2. Memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar 3. Letak geografis Kota Depok yang strategis berbatasan dengan ibukota negara
2.	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang siapnya OPD terkait dalam memahami Standar Akuntansi Berbasis Akrual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan penempatan SDM yang kurang sesuai dengan disiplin ilmu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditetapkan peraturan walikota terkait kebijakan dan sistem akuntansi berbasis akrual dan telah disesuaikan SIPKD berbasis akrual
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum sinkronnya penatausahaan penerimaan pajak antara kas daerah dengan bidang pendapatan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum adanya sistem yang memfasilitasi pembayaran pajak melalui mekanisme transfer ke kas daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Telah adanya sistem aplikasi dasar pajak daerah
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Prosedur updating data kepegawaian belum 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kurangnya koordinasi antara BKD dan OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kurangnya pemahaman dan



		optimal	dengan bidang perbendaharaan terkait updating data pegawai	pengetahuan pengelola kepegawaian di OPD terkait ketentuan di bidang kepegawaian
		4. Belum optimalnya proses penyusunan APBD	4. Belum optimalnya kualitas penyusunan dan penelitian RKA	4. Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kepedulian dan tanggungjawab pejabat terkait di masing masing OPD terhadap fungsi pengelolaan aset 2. Kurang tertibnya penatausahaan aset di masing – masing OPD 3. Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pengadaan barang 4. Tidak adanya kepastian waktu dalam penyelesaian sertifikat aset milik Pemkot karena dokumen alas hak atas aset pemerintah Kota Depok tidak lengkap sehingga menyulitkan dalam pengamanan aset dari aspek administrasinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan barang daerah 2. Audit aset dari aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah 3. Aset daerah mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan daerah bila dikelola dengan sebaik - baiknya
4.	Organisasi yang fit for purpose	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2015 untuk pelayanan pembayaran pajak adalah sebesar 88,34 atau kategori A (Kinerja Sangat Baik) dengan nilai gap tertinggi pada aspek fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan	Masih kurang optimalnya fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas semakin tinggi
5.	Sistem Informasi manajemen yang terintegrasi	Sistem teknologi informasi yang ada di setiap bidang masih terpisah pisah dan belum terintegrasi satu sama lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan dari masing masing sistem berbeda sehingga proses integrasi memerlukan waktu yang cukup lama 2. Tidak adanya SDM IT yang ditugaskan di DPPKA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat pesatnya perkembangan teknologi informasi 2. Makin dikenalnya konsep good governance bagi instansi pemerintah



II.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2015 untuk pelayanan pembayaran pajak adalah sebesar 88,34 atau kategori A (Kinerja Sangat Baik) dengan nilai gap tertinggi pada aspek fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan	Masih kurang optimalnya fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas semakin tinggi
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	1. Kurang siapnya OPD terkait dalam memahami Standar Akuntansi Berbasis Akrual	1. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan penempatan SDM yang kurang sesuai dengan disiplin ilmu	1. Telah ditetapkan peraturan walikota terkait kebijakan dan sistem akuntansi berbasis akrual dan telah disesuaikan SIPKD berbasis akrual
3.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	2. Belum sinkronnya penatausahaan penerimaan pajak antara kas daerah dengan bidang pendapatan 3. Prosedur updating data kepegawaian belum optimal 4. Belum optimalnya proses penyusunan APBD 5. Proses transparansi informasi keuangan masih dalam proses pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri	2. Belum adanya sistem yang memfasilitasi pembayaran pajak melalui mekanisme transfer ke kas daerah 3. Kurangnya koordinasi antara BKD dan OPD dengan bidang perbendaharaan terkait updating data pegawai 4. Belum optimalnya kualitas penyusunan dan penelitian RKA	2. Telah adanya sistem aplikasi dasar pajak daerah 3. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengelola kepegawaian di OPD terkait ketentuan di bidang kepegawaian 4. Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi 5. Sudah 4 kali berturut turut memperoleh capaian WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok
4.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi	Ukuran capaian kinerja belum dirumuskan secara kuantitatif	Belum dimanfaatkannya LAKIP untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan progam dan kegiatan, dan peningkatan kinerja	Kota lain sudah mendapatkan nilai LAKIP yang lebih baik
5.	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Payung hukum dari pusat terbit di tengah pelaksanaan anggaran sehingga kegiatan penyusunan produk hukum disisipkan ke kegiatan yang lain	Produk hukum yang dibuat harus menunggu payung regulasi dari pusat. Hal ini terkadang menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat	Setiap keputusan / kegiatan membutuhkan kepastian hukum



6.	Terhimpunnya dokumentasi dan informasi produk hukum	Belum terlaksananya dokumentasi dan informasi produk hukum	Kurangnya koordinasi diantara OPD terkait	Alat bantu dalam penyelesaian masalah dengan pihak lain
----	---	--	---	---

Adapun telaahan terhadap Renstra Provinsi, dalam hal ini Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA OPD PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT			
1.	Tercapaiannya penerimaan pendapatan daerah	Belum optimalnya pemungutan pajak daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 3. Kurang optimalnya provider sistem dalam memberikan pelayanan jaringan internet 4. Masih terbatasnya akses pembayaran secara elektronik 5. Belum adanya SDM penegak hukum bidang perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pajak daerah sudah berbasis teknologi informasi 2. Memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar 3. Letak geografis Kota Depok yang strategis berbatasan dengan ibukota negara
2.	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah			
3.	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dasar yang ada tidak akurat. 2. Data yang sudah ada tidak pernah di update sehingga perencanaan tidak berdasarkan data yang terkini 	Kegiatan pendataan yang dilaksanakan hasilnya tidak memuaskan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya target 2. Adanya tuntutan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan
4.	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2015 untuk pelayanan pembayaran pajak adalah sebesar 88,34	Masih kurang optimalnya fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas semakin tinggi



		atau kategori A (Kinerja Sangat Baik) dengan nilai gap tertinggi pada aspek fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan		
5.	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Masih terbatasnya sentra pelayanan dengan jumlah wajib pajak yang harus dilayani	Masih kurang optimalnya fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas semakin tinggi
6.	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	Pelayanan pajak daerah belum seluruhnya dilayani secara on line	Perlunya waktu dalam pelaksanaan MOU dengan bank persepsi	Perkembangan Teknologi Informatika yang sangat pesat mendukung terealisasinya sistem pelayanan pajak daerah secara on - line sepenuhnya
7.	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan	Masih kurangnya sinergitas di antara OPD penghasil pendapatan	Kurangnya komitmen untuk memecahkan masalah bersama	Pencapaian target RPJM
8.	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	1. Pengelola kegiatan tidak disiplin dalam melaksanakan kegiatan 2. Penyusunan anggaran kas tidak cermat	Telah tersedia aplikasi SIEP dan SIEVK
		Ukuran capaian kinerja belum dirumuskan secara kuantitatif	Belum dimanfaatkannya LAKIP untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan progam dan kegiatan, dan peningkatan kinerja	Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKA telah disusun sesuai peraturan yang berlaku dan selaras dengan dokumen atasannya (RKPD dan RPJMD)
		Pengalokasian anggaran kegiatan tidak pada nomenklatur program yang telah ditetapkan	Tidak disiplin dalam pelaksanaan proses perencanaan	Semua anggaran kegiatan harus dialokasikan sesuai dengan nomenklatur yang ada
9.	Meningkatnya kualitas SDM	Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur DPPKA
II.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT			
1.	Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan, pengendalian dan informatif keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan Prima	1. Kurang siapnya OPD terkait dalam memahami Standar Akuntansi Berbasis Akrua	1. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan penempatan SDM yang kurang sesuai dengan disiplin ilmu	1. Telah ditetapkan peraturan walikota terkait kebijakan dan sistem akuntansi berbasis akrua dan telah disesuaikan SIPKD berbasis akrua



		2. Belum sinkronnya penatausahaan penerimaan pajak antara kas daerah dengan bidang pendapatan	2. Belum adanya sistem yang memfasilitasi pembayaran pajak melalui mekanisme transfer ke kas daerah	2. Telah adanya sistem aplikasi dasar pajak daerah
		3. Prosedur updating data kepegawaian belum optimal	3. Kurangnya koordinasi antara BKD dan OPD dengan bidang perbendaharaan terkait updating data pegawai	3. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengelola kepegawaian di OPD terkait ketentuan di bidang kepegawaian
2.	Terwujudnya aparat pengelola keuangan yang profesional	Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur DPPKA
3.	Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang teknologi informasi dan akuntansi			
4.	Terwujudnya penyusunan APBD yang aspiratif, transparan, dan akuntabel yang berorientasikan kepada anggaran kinerja (Activities Based Costing)	Belum optimalnya proses penyusunan APBD	Belum optimalnya kualitas penyusunan dan penelitian RKA	Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2032.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

NO.	RTRW KOTA DEPOK TAHUN 2012 - 2032 TERKAIT FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota	Peraturan yang ada kemungkinan akan menghambat para pebisnis. Contoh : Rumah dengan luas minimal kavling 120 m2	Daya beli masyarakat pada umumnya masih rendah	Bencana alam yang disebabkan karena tidak adanya zona resapan air
2.	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa baru ke wilayah Kota Depok bagian selatan, barat dan timur	Semakin banyaknya pendatang / urban dari kota lain	Tumbuhnya / bertambahnya kantong – kantong umum	Potensi PAD meningkat
3.	Penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa	Banyaknya parkir liar dan sulit ditertibkan	Kurangnya law enforcement / penegakan hukum	Potensi PAD meningkat
4.	Fasilitasi pertumbuhan kawasan perumahan secara vertikal	Penyediaan kebutuhan air rumah tangga semakin besar	Ketaatan dan kesadaran WP dalam membayar pajak air tanah masih rendah	Potensi PAD meningkat. Pajak air tanah pada tahun mendatang diarahkan menjadi pajak propinsi
5.	Zona permukiman dengan kepadatan tinggi, sedang dan rendah adalah untuk pembangunan perumahan dengan luas minimum kavling sebesar 120 (seratus dua puluh) meter persegi	Menurunnya bisnis properti di Depok yang berdampak pada menurunnya transaksi BPHTB	Daya beli masyarakat pada umumnya masih rendah	Target PAD yang semakin meningkat

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap tata ruang, KLHS, Renstra Kementerian / Lembaga / Renstra OPD Provinsi serta dengan mengacu kepada telaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka disusunlah Isu-Isu Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya aparatur DPPKA
2. Kualitas pelayanan pajak
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4. Pengelolaan Keuangan dan Aset yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI
5. Optimalisasi Pengelolaan Aset
6. Pembangunan dan Pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi